



Pengadilan Negeri Situbondo

Jl. PB. Sudirman No. 97 - Kab. Situbondo 68312

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Laporan Kinerja ini merupakan realisasi Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani dan diisepakatai di awal tahun anggaran. menjadi sebuah kontrak kinerja antara Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Situbondo



itpnsitubondo@gmail.com

www.pn-situbondo.go.id



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Nomor: 1668.2/KPN.W14-U18/RA1.10/XII/2025



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Jl. Panglima Besar Sudirman No.97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, Telp. [\(0338\) 671397](tel:0338671397)
Website: www.pn-situbondo.go.id
Email: itpnsitubondo@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Kami telah mereviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo untuk Tahun Anggaran 2026 sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung RI untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025. Perjanjian Kinerja ini berfokus pada modernisasi peradilan, efisiensi penyelesaian perkara, dan peningkatan layanan publik.

Tujuan utama reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah untuk memastikan dokumen perencanaan kinerja telah disusun secara valid, akurat, dan sesuai aturan, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta perbaikan berkesinambungan atas pencapaian target kinerja. Reviu ini memastikan keselarasan antara kinerja dengan anggaran serta memperkuat komitmen pencapaian kinerja

Reviu ini dilakukan secara berkala (seringkali tahunan) untuk memastikan seluruh unit peradilan di bawah Mahkamah Agung bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pereviu I,



Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Pereviu II,



Alto Antonio, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ACHMAD RASJID, S.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Situbondo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001

2 Januari 2025
Pihak Pertama,

ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
			1. Pidana	100%
			2. Perdata	80%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	1%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%
	f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak. tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	3%
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	1%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		
1	2	3	4	5		
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%		
		b	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%		
		c	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%		
		d	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%		
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJIP minimal "BB"	A		
		b.	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK		
		c.	Nilai IPK	92%		
		d.	Nilai IKM	92%		
		e.	Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Pengadilan Kelas I B	Unggul		
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%		
		g	Prosentase realisasi anggaran belanja	98%		
		h	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%		
		i	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	97%		
		j	Prosentase kedisiplin masuk kerja	100%		
		k	Pelanggaran disiplin	0		
		7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1
				b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	150Mbps
c	Prosentase distribusi surat			100%		
d	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu			80%		
e	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat			100%		
f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait			5		
g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia			40		
h	Jumlah layanan pengadilan			8		
i	Jumlah pengguna layanan pengadilan			300		
j	Jumlah layanan bantuan hukum			120		
k.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian			100%		
l	Jumlah pemeliharaan gedung			1/1540 m2		
m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas			7/884 m2		
n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin			638		
o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga			12		
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Peradilan Dalam mendukung	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	50%		

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.340.340.000,00
	A. Layanan Umum	Rp. 700.000,00
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 5.219.340.000,00
	C. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 300.000,00
	D. Layanan Sarana Internal	Rp. 120.000.000,00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 107.940.000,00
	A. Pembinaan dan Pengawasan Aparatir Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 78.440.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Rp. 28.000.000,00



Pihak Kedua,

H. CHARIS WARDIWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001



Situbondo, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,

ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1 001

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **Dr. NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

selanjutnya disebut sebagai ***pihak pertama.***

N a m a : **SUJATMIKO, S.H., M.H**
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua.***

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Situbondo, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,


Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 19600812198612 1 001

Pihak Pertama,

Dr. Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.
NIP. 19770717 200012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	30%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25%
		1.9	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	n/a
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B Tahun 2026 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	
	A. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.966.048.000
	B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 9.137.296.000
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	A. Koordinasi	Rp. 750.000
	B. Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 78.515.000
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 30.000.0000
	D. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.800.000

Situbondo, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 19600812198612 1 001

Pihak Pertama,



Dr. Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H
NIP. 19770717 200012 1 002

LAMPIRAN REVIU/REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadilan Negeri Situbondo

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target %				
			I	II	III	IV	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98	98	98	98
		1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	30	30	30	30
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8	8	8	8
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25

1.9	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	n/a	n/a	n/a	n/a
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100
1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target %			
			I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1	98	98	98	98
		3.1	80	80	80	80
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.2	95	95	95	95
		3.3	95	95	95	95
		3.4	3	3	3	3



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 1611/KPN.W14-U18/SK.RA1.10/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia perlu disusun perjanjian kinerja tahunan.
- b. Bahwa Perjanjian Kinerja Tahunan merupakan pernyataan dari aparat peradilan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- c. Bahwa dengan adanya komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahunan dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, untuk monitoring dan evaluasi, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu dibentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Situbondo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang...



3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;

KESATU : Menunjuk nama - nama sebagaimana termuat dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2026;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 terdiri dari pernyataan dan lampiran perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagaimana formulir pada lampiran II keputusan ini, yang selanjutnya akan ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat.

KETIGA : Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB melaporkan hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB paling lambat tanggal 30 Desember 2025;

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
Nomor : 1611/KPN.W14-U18/SK.RA1.10/XII/2025
Tanggal : 15 Desember 2025
Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja
Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

**TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Haries Suharman Lubis , S.H.MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Alto Antonio, S.H., M.H.	Hakim	Pengarah dan Evaluator
4.	Maria Theresia Reny Puspita Sari, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Hari Yulanto, S.E.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Shofil Setyarini, S.Sos.	Kepala Subbagian, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris Tim
7.	Agus Widodo, SH.,MH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Khudzaifah, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Abd. Mukti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	Intan Mustika Atmaningrum, S.H.	Kepala ubbagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
12.	Anis Ismatun Nisa', S.H., M.Kn.	Analisis Perkara Peradilan	Pengelola Data
13.	Anis Rukmawati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pengelola Data



NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14.	Diajeng Linggar Ratieh Putri Cipto, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Pengelola Data
15.	Dany Dhiman Septyawan, S.E.	Penata Layanan Operasional	Pengelola Data
16.	Amirul Hadi, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Pengelola Data
17.	Hadi Prasetya, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Pengelola Data
18.	Faris Zainul Anwar, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Data

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



